Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia
Volume 8, Nomor 1, September 2026

p-ISSN: 2685 - 9203
e-ISSN: 2686 - 5610

ANALISIS SISTEM KEUANGAN DIGITAL DAN MEKANISME TRANSPARANSI PENGURUS ORGANISASI NIRLABA

Rona Alifah*, Ahmad Syifa' Bifana, Immanuela Lyse Cristanta
Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the digital financial system and internal control mechanisms in mitigating information asymmetry, to explore the strategies employed by the management in providing information disclosure to support social auditing by the congregation, and to explain the impact of reporting accountability and program realization on the sustainability of the nonprofit organization at Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5. This study employs a qualitative approach with an interpretive paradigm and a descriptive case study design, with primary data obtained through in-depth interviews with the foundation's management and finance staff as internal informants, semi-structured interviews with active congregation members as external informants, as well as field observation and documentation, which were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model and verified through source triangulation. The results indicate that the mitigation of information asymmetry is carried out through three layers of mechanisms, namely the digitalization of record-keeping with segregation of duties, the standardization of written accounting policies, and a tiered governance structure, while information disclosure strategies are already available through various formal channels. This study contributes empirical evidence that, unlike the document-based verification assumed in prior nonprofit transparency literature, social auditing in religious nonprofit organizations can take the form of direct sensory verification. These findings indicate that social auditing in religious nonprofit organizations takes place through physical observation and direct experience rather than formal document verification, so that the management needs to expand its financial reporting publication channels to be more inclusive of the entire congregation.*

Keywords: *Digital Financial System, Information Asymmetry, Social Audit, Accountability, Organizational Sustainability*

*Corresponding Author.
e-mail: rona64n@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem keuangan digital dan mekanisme pengawasan internal dalam memitigasi asimetri informasi, menggali strategi pengurus dalam menyediakan keterbukaan informasi guna mendukung audit sosial oleh jamaah, serta menjelaskan dampak pemenuhan akuntabilitas pelaporan dan realisasi program terhadap keberlanjutan organisasi nirlaba pada Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif dan jenis studi kasus deskriptif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus yayasan dan bidang keuangan sebagai informan internal, wawancara semi-terstruktur dengan jamaah aktif sebagai informan eksternal, serta observasi dan dokumentasi lapangan, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman dan diverifikasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi asimetri informasi dilakukan melalui tiga lapis mekanisme, yaitu digitalisasi pencatatan dengan pemisahan tugas, standarisasi kebijakan akuntansi tertulis, dan struktur tata kelola berjenjang, sementara strategi keterbukaan informasi telah tersedia dalam berbagai saluran formal. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa bukti empiris bahwa audit sosial pada organisasi nirlaba keagamaan dapat berlangsung melalui verifikasi inderawi langsung, berbeda dari asumsi verifikasi dokumen formal yang selama ini dominan dalam literatur transparansi organisasi nirlaba. Temuan ini mengindikasikan bahwa audit sosial pada organisasi nirlaba keagamaan berjalan melalui observasi fisik dan pengalaman langsung, bukan verifikasi dokumen formal, sehingga pengurus perlu memperluas kanal publikasi laporan keuangan yang lebih inklusif bagi seluruh jamaah.

Kata kunci: Sistem Keuangan Digital, Asimetri Informasi, Audit Sosial, Akuntabilitas, Keberlanjutan Organisasi

PENDAHULUAN

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang eksistensinya berdiri di atas fondasi kepercayaan publik. Dana operasional yang dikelola sepenuhnya berasal dari masyarakat. Sumbernya beragam, mulai dari infak, sedekah jumat, hingga sumbangan sukarela lainnya. Karena itu, pengurus masjid mengemban tanggung jawab moral yang besar untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan.

Menurut Anggraini *et al*. (2026), perputaran dana infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angkanya bergerak dari 13.56 kali pada tahun 2021 menjadi 16.57 kali pada tahun 2022, kemudian melonjak tajam menjadi 70.52 kali pada tahun 2023. Peningkatan

frekuensi perputaran ini sejalan dengan pertumbuhan dana infak yang mencapai 184.51% pada tahun 2023, setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi sebesar -13.56% pada tahun 2022 akibat konsolidasi internal pascapandemi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan penghimpunan dana infak tidak hanya berdampak pada bertambahnya volume dana yang dikelola, tetapi juga diikuti oleh percepatan penyaluran, sehingga dana infak dapat lebih cepat disalurkan kepada mustahik tanpa mengendap lama di lembaga.

Fenomena tingginya rasio perputaran dan pertumbuhan dana infak yang ditunjukkan LAZISNU sesungguhnya mencerminkan kondisi ideal pengelolaan dana filantropi Islam, di mana laporan keuangan yang sistematis dan sesuai dengan standar memungkinkan lembaga memantau arus dana secara akurat dan responsif. Namun, kapasitas tata kelola semacam itu umumnya hanya dimiliki oleh lembaga amil zakat berskala nasional yang memiliki sumber daya manusia dan sistem akuntansi memadai, sementara masjid-masjid di tingkat lokal, khususnya di kawasan perkotaan dengan volume transaksi yang tidak kalah besar, justru belum tentu memiliki kapasitas serupa. Kesenjangan inilah yang menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut pada kasus Masjid An-Nashr di Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan, sebab tingginya perputaran dana dari berbagai sumber pemasukan tidak serta-merta diiringi oleh sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang setara dengan praktik pengelolaan zakat modern seperti yang diterapkan LAZISNU. Padahal, masjid ini memiliki perputaran pos pendapatan besar dari donasi rutin, kotak amal tunai, transfer perbankan, hingga instrumen digital seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Kondisi perputaran dana yang masif dengan pencatatan yang rentan berpotensi memicu fenomena asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi antara pengurus masjid dan jamaah. Pengurus mengelola dana dan mengetahui persis aliran perputaran uang secara mendetail, sedangkan jamaah selaku prinsipal memberikan amanah dana namun minim akses terhadap rincian penggunaannya. Jika kesenjangan informasi ini dibiarkan larut tanpa ada keterbukaan, tingkat kepercayaan warga terhadap kredibilitas pengurus bisa menurun, yang pada akhirnya mengancam eksistensi dan stabilitas pendanaan operasional masjid.

Isu transparansi ini sebenarnya bukan hal baru dalam literatur manajemen organisasi nirlaba. Pengungkapan informasi yang bersifat wajib (*Mandatory Disclosure*) terbukti secara empiris mempengaruhi persepsi dan keputusan donasi masyarakat (Barber *et al*., 2022). Selain itu, akuntabilitas berbasis situs web atau *platform* digital (*Web-based Accountability*) memungkinkan publik menilai kinerja operasional dan finansial suatu organisasi nirlaba secara lebih objektif dan berkelanjutan (Chu & Luke, 2023). Kedua hal ini pada dasarnya

menggambarkan situasi yang serupa dengan yang terjadi di Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5, di mana sistem keuangan digital yang sudah mulai diimplementasikan memiliki potensi besar untuk membangun kepercayaan jamaah.

Meskipun isu transparansi bukan hal baru dalam literatur manajemen organisasi nirlaba, riset terdahulu terkait pengungkapan wajib (Barber *et al*., 2022) dan akuntabilitas berbasis web (Chu & Luke, 2023) umumnya berhenti pada bagaimana informasi disediakan. Bagaimana pihak penerima informasi, yaitu jamaah, benar-benar memverifikasi keterbukaan itu di tingkat komunitas justru belum ditelaah. Celah inilah yang coba dijawab oleh penelitian ini, dengan memilih Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5 sebagai kasus. Entitas ini memiliki tata kelola perkotaan yang relatif kompleks dan perputaran dana operasional bulanan yang signifikan, sehingga potensi asimetri informasi dan kebutuhan mekanisme pengawasan partisipatif dari jamaah menjadi lebih relevan untuk diamati.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menganalisis bagaimana pengurus memitigasi asimetri informasi melalui standardisasi internal. Kedua, menggali strategi pengurus dalam menyediakan keterbukaan informasi guna mendukung "Audit Sosial" oleh jamaah. Ketiga, menjelaskan dampak pemenuhan akuntabilitas pelaporan dan realisasi program terhadap keberlanjutan organisasi nirlaba. Ketiga tujuan tersebut dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana pengurus yayasan An-Nashr memitigasi asimetri informasi melalui mekanisme internal? (2) Bagaimana strategi pengurus dalam menyediakan keterbukaan informasi untuk mendukung audit sosial oleh jamaah, dan sejauh mana strategi tersebut menjangkau jamaah secara merata? (3) Bagaimana pemenuhan akuntabilitas pelaporan dan realisasi program berdampak terhadap keberlanjutan organisasi nirlaba tersebut?

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur audit sosial dan teori keagenan. Kontribusinya berupa penunjukan bentuk audit sosial yang berjalan melalui verifikasi inderawi, bukan verifikasi dokumen formal. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus organisasi nirlaba keagamaan. Masukan tersebut menyangkut perancangan strategi keterbukaan informasi yang lebih menjangkau jamaah secara merata.

Audit sosial dalam konteks ini bukan merupakan pemeriksaan formal oleh akuntan publik, melainkan mekanisme kontrol independen dari warga. Jamaah secara mandiri mencocokkan laporan keuangan yang disajikan pengurus dengan tingkat kemakmuran kegiatan keagamaan serta realitas kondisi fisik fasilitas masjid yang mereka rasakan sehari-hari.

Fokus penelitian ini adalah membedah kesiapan manajerial internal pengurus dalam menyajikan keterbukaan informasi untuk memfasilitasi pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih utuh mengenai bagaimana tata kelola keuangan berbasis digital pada organisasi nirlaba keagamaan dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan pengawasan partisipatif dari jamaah selaku pemangku kepentingan utama.

LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka

Dalam konteks organisasi nirlaba seperti masjid, Teori Keagenan (*Agency Theory*) menggambarkan hubungan antara dua pihak (Jensen & Meckling, 1976). Jamaah atau donatur berperan sebagai pemilik dana (*principal*), sedangkan pengurus masjid berperan sebagai pemegang amanah (*agent*). Potensi masalah keagenan, khususnya asimetri informasi, bisa muncul jika pengurus memonopoli informasi keuangan sementara jamaah tidak mengetahui detailnya. Jika dibiarkan, hal ini tentu dapat mengancam stabilitas pendanaan masjid.

Oleh karena itu, pengurus memiliki kewajiban untuk memfasilitasi apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai "Audit Sosial", yaitu bentuk pengawasan partisipatif langsung dari jamaah. Istilah ini sengaja dipakai karena organisasi nirlaba keagamaan seperti masjid tidak diaudit sebagaimana lembaga pemerintah yang mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pada umumnya tidak memiliki auditor independen. Pengawasan terhadap pengurus, dengan begitu, berjalan secara informal dan natural dari jamaah sendiri. Warga atau jamaah biasanya menilai kinerja pengurus bukan semata dari angka di atas kertas, melainkan dengan membandingkan laporan kas yang dipublikasikan dengan realitas yang ada di lapangan, seperti semaraknya kegiatan keagamaan, kualitas kajian, serta kelayakan fisik sarana dan prasarana masjid.

Dengan kata lain, "Audit Sosial" dalam penelitian ini adalah istilah konseptual yang diajukan peneliti sendiri untuk menggambarkan fenomena kontrol informal tersebut, bukan istilah baku yang diambil dari satu sumber akademik tertentu. Istilah ini berbeda dari *social accounting*, yang umumnya merujuk pada pelaporan dampak sosial-lingkungan oleh organisasi kepada publik secara sukarela. Berbeda pula dari *participatory monitoring*, yang biasanya melibatkan struktur pemantauan formal dengan indikator dan pelaporan berkala.

"Audit Sosial" yang dimaksud di sini justru berlangsung tanpa struktur formal semacam itu: verifikasinya dilakukan jamaah secara individual dan spontan, melalui pengamatan langsung terhadap kondisi fisik masjid dan kualitas layanan, bukan melalui mekanisme pelaporan yang disepakati bersama.

Konsep mengenai transparansi sebenarnya tidak sekadar tentang "terbuka atau tertutup". Dethier *et al*. (2024) mendefinisikannya sebagai bentuk konstruk multidimensi yang diukur dari aksesibilitas, kelengkapan, dan akurasi informasi berdasarkan persepsi pihak yang berkepentingan. Selain itu, Dethier *et al*. (2023) menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan menentukan keberlanjutan pendanaan melalui donasi. Hal ini diperkuat oleh Nurdiani *et al*. (2025) yang menemukan bahwa pemanfaatan alat digital, seperti pelaporan *online*, sangat efektif untuk mendorong transparansi keuangan secara *real-time*.

Berbagai temuan yang ada akan membantu penelitian ini membangun kerangka berpikir bahwa menekan asimetri informasi tidak cukup hanya dengan pembukuan yang rapi. Dibutuhkan pula jaminan aksesibilitas, kelengkapan, dan keberlanjutan informasi bagi jamaah selaku principal. Prinsip inilah yang menjadi fokus utama dalam mengamati praktik pengelolaan keuangan di Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5. Prinsip aksesibilitas dan kelengkapan informasi tersebut sekaligus menjadi acuan analisis pada bagian pembahasan, khususnya dalam menilai sejauh mana saluran publikasi yang telah tersedia mampu menjangkau seluruh lapisan jamaah dan tidak terbatas hanya kepada kalangan yang aktif menghadiri forum formal pengurus.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berpijak pada beberapa studi terdahulu yang secara sistematis dikelompokkan menjadi tiga tema utama sebagai landasan sekaligus pembanding. Pertama, terkait dengan isu standar akuntansi dan kendala teknis, riset ini merujuk pada Melia (2022), Widhawati *et al*. (2021), dan Lating (2023). Ketiganya menyoroti belum maksimalnya penerapan standar keuangan, seperti Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, pada entitas nirlaba akibat keterbatasan kapasitas pengurus. Berbeda dengan studi-studi tersebut yang lebih berfokus pada format teknis laporan atau sekadar tinjauan literatur umum, penelitian ini langsung membedah proses pengawasan dari sisi jamaah (audit sosial).

Kedua, mengenai transparansi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik, temuan

dari Hanida *et al*. (2024), Yudhanti & Margarita (2024), Barber *et al*. (2022), serta Dethier *et al*. (2024) menjadi acuan. Keempat studi itu menegaskan bahwa kelengkapan, keterbukaan, dan akurasi pengungkapan informasi keuangan sangat memengaruhi persepsi serta motivasi donatur. Riset-riset sebelumnya banyak mengkaji motivasi donatur secara makro maupun konseptual, sedangkan penelitian ini mencoba mengisi celah dengan menghadirkan sudut pandang mikro empiris di tingkat komunitas. Fokusnya adalah kepada mekanisme kontrol audit sosial di tingkat masjid untuk memitigasi asimetri informasi.

Ketiga, di ranah pelaporan digitalisasi, Chu & Luke (2023) dan Nurdiani *et al*. (2025) menjadi rujukan utama. Keduanya membuktikan bahwa pelaporan berbasis web merupakan elemen yang sangat krusial untuk akuntabilitas secara real-time. Sebagai pembeda, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif secara primer untuk melihat langsung integrasi sistem digital di Masjid An-Nashr. Dengan cara itu, penelitian tidak berhenti pada narasi tinjauan literatur yang belum tentu relevan dengan konteks lokal.

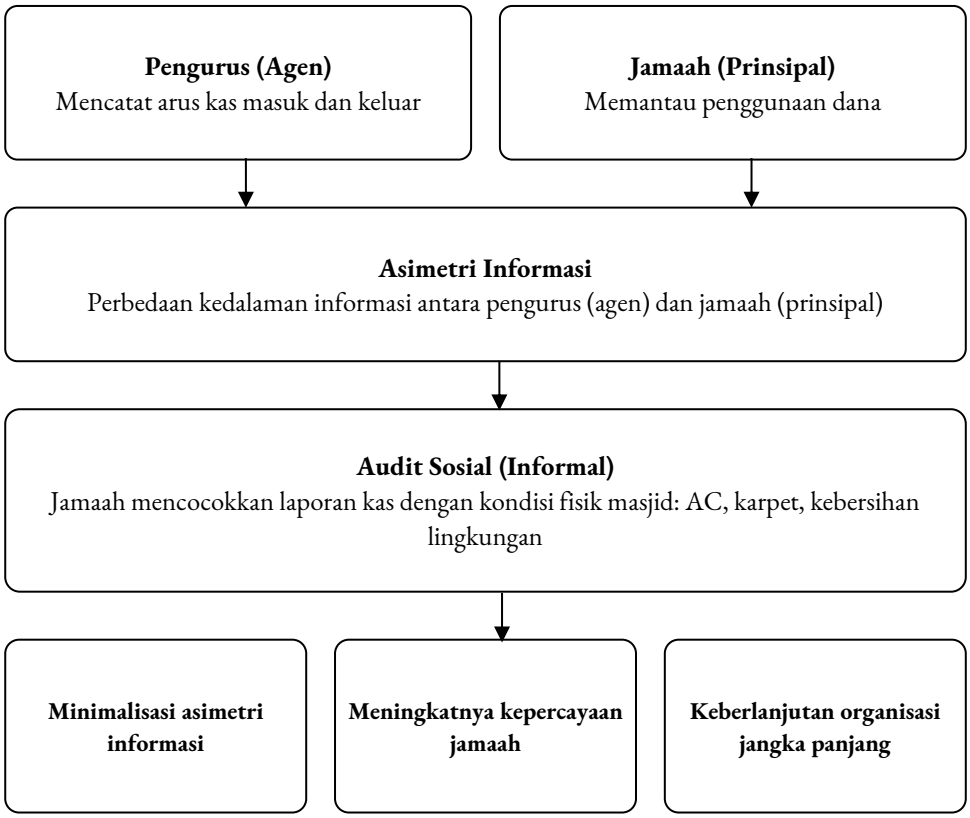
Kerangka Pemikiran

Berangkat dari landasan tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas dasar kewajiban akuntabilitas pengelolaan dana umat (infak, sedekah, donasi) di Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5. Secara konseptual operasional, alurnya bermula dari proses keagenan. Pengurus bertindak selaku agen yang mencatat arus kas masuk dan keluar, sedangkan jamaah selaku prinsipal memiliki hak untuk memantau penggunaan dana. Perbedaan kedalaman informasi di antara kedua belah pihak inilah yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi.

Sebagai solusinya, jamaah secara informal melakukan "Audit Sosial". Proses ini terjadi ketika jamaah mencocokkan kesesuaian antara laporan kas yang dipublikasikan dengan realitas fisik fasilitas masjid yang mereka rasakan langsung, seperti kondisi AC, karpet, hingga kebersihan lingkungan masjid. Melalui metode wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan, penelitian ini menganalisis kesiapan sistem pelaporan pengurus ketika dihadapkan pada fungsi kontrol jamaah tersebut. Luaran (*output*) yang diharapkan mencakup minimalisasi asimetri informasi, meningkatnya kepercayaan jamaah, serta terjaminnya keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Alur kerangka pemikiran tersebut disajikan pada Gambar 1.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini mengajukan tiga proposisi. Proposisi 1: digitalisasi pencatatan yang disertai pemisahan tugas dan kebijakan akuntansi

tertulis berperan menurunkan asimetri informasi antara pengurus (agen) dan jamaah (prinsipal). Proposisi 2: ketersediaan saluran keterbukaan informasi secara formal tidak dengan sendirinya menjangkau seluruh jamaah, sehingga audit sosial pada level jamaah individual cenderung berlangsung melalui observasi fisik dan pengalaman langsung dibandingkan verifikasi dokumen laporan keuangan. Proposisi 3: pemenuhan akuntabilitas pelaporan dan realisasi program yang konsisten berkontribusi pada keberlanjutan pendanaan organisasi nirlaba keagamaan.



Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah peneliti (2026)

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif dan desain studi kasus deskriptif. Desain tersebut dipilih untuk membedah secara spesifik dan mendalam sudut pandang manajerial pengurus (agen) mengenai mekanisme perencanaan, pencatatan akuntansi berbasis sistem digital, publikasi informasi, serta fasilitasi audit sosial yang berjalan pada konteks riil di Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan. Objek penelitian ini adalah sistem tata kelola keuangan dan pengawasan berbasis internal pada masjid tersebut. Pemilihan objek didasari alasan bahwa entitas tersebut memiliki karakteristik tata kelola perkotaan modern yang kompleks, perputaran dana operasional bulanan yang signifikan, serta variasi sumber penerimaan yang dikelola.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara semi-terstruktur kepada dua informan kunci internal, yaitu ketua pengurus yayasan dan staf bagian akuntansi, dan tiga jamaah aktif guna menggali persepsi mereka terkait sejauh mana keterbukaan informasi keuangan dirasakan pada level jamaah. Data primer juga diperkuat melalui observasi langsung dan dokumentasi visual terhadap fasilitas fisik masjid. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan yayasan tahun 2025, dokumen kebijakan akuntansi internal, serta literatur dan pedoman pelaporan keuangan entitas nirlaba khususnya pedoman pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan posisi dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian: dua informan pengurus dipilih karena memegang peran pengambilan kebijakan dan pencatatan keuangan sehari-hari, sedangkan tiga informan jamaah dipilih dari jamaah aktif yang rutin mengikuti kegiatan masjid sehingga memiliki paparan informasi yang representatif terhadap saluran publikasi yang tersedia. Kedua kelompok informan diwawancarai dengan teknik yang sama, yaitu wawancara semi-terstruktur, menggunakan pedoman wawancara berisi daftar topik yang disiapkan di muka namun tetap fleksibel untuk digali lebih dalam ketika jawaban informan membuka informasi baru yang relevan. Wawancara dengan pengurus dan jamaah dilakukan secara tatap muka (*offline*) dengan durasi masing-masing berkisar 45-60 menit. Penetapan lima orang informan

dalam studi ini dipandang telah memenuhi kecukupan sampel kualitatif. Keputusan untuk mengakhiri pencarian informan didasarkan pada indikator kejenuhan data, yang menandakan bahwa keragaman gagasan dari fenomena yang diteliti telah terekam secara komprehensif tanpa adanya temuan konsep baru.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), yang terdiri atas tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi dan pengodean data dilakukan dengan bantuan aplikasi *qualitative data analysis* (QDA) *open-source* Taguette. Aplikasi tersebut dipakai untuk melakukan highlighting dan pengategorian tema dari transkrip wawancara sebelum masuk ke tahap penyajian data. Keabsahan data diverifikasi menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2023) dengan membandingkan hasil wawancara pengurus (perspektif agen), wawancara jamaah (perspektif prinsipal), dan hasil observasi serta dokumentasi visual fasilitas fisik di lapangan.

Proses pengodean dilakukan secara induktif menggunakan bantuan perangkat lunak Taguette. Kode awal (*open coding*) dimunculkan langsung dari kutipan transkrip wawancara dan dokumen. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam sub-tema dan rumusan masalah yang lebih besar (*axial coding*), sebagaimana terekam pada lembar kerja pengodean penelitian ini. Seluruh proses pengodean dan reduksi data dilakukan oleh peneliti sendiri, kemudian hasil interpretasinya dikonfirmasikan kembali kepada pengurus yayasan sebagai bentuk pengecekan anggota (*member checking*) sebagaimana dijelaskan pada sub-bagian etika penelitian.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Profil Informan dan Prosedur Analisis Data

Seluruh proses pengambilan data pada penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian. Informan dari unsur pengurus dihubungi satu minggu sebelum wawancara melalui kanal humas yayasan untuk memperoleh kesediaan berpartisipasi. Setelah kesediaan diperoleh, peneliti meminta izin secara eksplisit untuk merekam audio wawancara serta mendokumentasikan kondisi beberapa fasilitas fisik masjid sebagai bahan triangulasi. Sebagai bentuk pengecekan anggota (*member checking*), peneliti juga meminta pengurus untuk

melakukan crosscheck terhadap hasil olah data, dan sebelum naskah ini disusun, pengurus telah diminta membaca dan menyetujui isi Bab I sampai Bab V penelitian ini.

Seluruh transkrip wawancara pengurus, transkrip wawancara jamaah, dan laporan keuangan yayasan tahun 2025 dimasukkan ke dalam sistem Taguette. Melalui proses reduksi data, terdapat 49 kutipan yang dilakukan proses coding ke dalam 9 subtema (tag), yang kemudian disusun ke dalam 3 kategori utama sesuai rumusan masalah penelitian, yaitu, mitigasi asimetri informasi (18 kutipan), keterbukaan informasi dan audit sosial (21 kutipan), serta akuntabilitas dan keberlanjutan (10 kutipan). Distribusi tersebut menunjukkan bahwa subjek keterbukaan informasi dan audit sosial memperoleh proporsi kutipan terbanyak, mengindikasikan bahwa area ini merupakan bagian dengan variasi pandangan antarinforman yang paling kaya. Rekapitulasi lengkap hasil koding, mencakup rumusan masalah, kode tag, sumber dokumen, informan, serta kutipan/*highlight* terkait, disajikan pada Tabel 1.

Mitigasi Asimetri Informasi melalui Digitalisasi Pencatatan dan Tata Kelola Berlapis

Hasil reduksi data menunjukkan bahwa Yayasan An-Nashr telah menstandardisasi sumber penerimaan ke dalam empat kanal utama, yaitu kotak amal tunai, transfer perbankan, QRIS, dan zakat/infak dalam bentuk barang. Dana fisik pertama kali dimasukkan ke dalam buku kas oleh bagian keuangan sebelum kemudian direkap setiap minggu dan diinput ke dalam sistem akuntansi digital zahir. Pernyataan ketua pengurus mengenai alur ini dikonfirmasi secara independen oleh staf bagian akuntansi, yang menunjukkan triangulasi sumber internal yang kuat tentang praktik pemisahan tugas antara pemegang kas dan pencatat sistem. Mengingat pola penerimaan masjid sangat dipengaruhi oleh peristiwa keagamaan seperti Ramadhan, siklus pelaporan turut disesuaikan dengan kalender Hijriah. Temuan ini didukung oleh dokumen laporan keuangan, di mana kas dan bank dipisahkan ke dalam sembilan pos berbeda, di antaranya kas sekretariat, kas ibadah dan dakwah, kas Lembaga Amil Zakat (LAZ), kas *Amil Management Cash* **(**AMC), kas pendidikan, serta kas pembangunan, dengan rekening bank tersendiri pada setiap pos.

Selain digitalisasi pencatatan, ditemukan pula bahwa masalah terbesar dalam pelaporan keuangan bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan pada ketiadaan aturan yang jelas tentang kapan suatu biaya dianggap sebagai beban operasional atau aset dalam pelaksanaan (*Construction in Progress*/CIP). Dua kutipan dokumen mengonfirmasi bahwa yayasan telah menetapkan standar kuantitatif eksplisit melalui Surat Keputusan Nomor 003/YAN-SEKRE/SK/VIII/2025 tentang Pencatatan Aset dan Kebijakan Ketua Yayasan Nomor

001/YAN/KETUA/VIII/2025 tentang Kapitalisasi Pekerjaan dalam Pelaksanaan. Kedua kebijakan tersebut menetapkan bahwa suatu pos dianggap sebagai aset apabila nilai perolehannya melebihi Rp3.000.000, sementara pekerjaan dalam pelaksanaan dianggap sebagai aset jika nilainya mencapai minimal Rp1 miliar dan/atau telah berjalan selama dua tahun. Kedua kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2025, bersamaan dengan periode laporan keuangan yang dianalisis, menunjukkan bahwa standardisasi kebijakan akuntansi telah didokumentasikan secara formal dan diterapkan secara konsisten, bukan sekadar klaim lisan pengurus.

Temuan yang paling kaya data ditemukan pada aspek struktur tata kelola, yang terdiri atas dewan pembina (setara dewan komisaris), dewan pengawas (setara fungsi audit internal), dan dewan pengurus (setara direksi). Sebelum tahun berjalan dimulai, pengurus wajib menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang harus disetujui oleh dewan pembina. Aktivitas yang tidak dianggarkan tidak akan dilayani oleh sekretariat. Tugas dewan pengawas adalah memastikan eksekusi program sesuai RKA dan menegur penyimpangan, sebagaimana ditegaskan langsung oleh ketua pengurus "kalau tidak direncanakan, berarti Anda merencanakan suatu kegagalan." Independensi fungsi pengawasan ini diperkuat oleh komposisi sumber daya manusia dewan pengawas dan dewan pembina yang diisi secara sukarela (*volunteer*) oleh individu dengan latar belakang profesi lintas sektor, termasuk mantan pejabat kejaksaan agung dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), sehingga kapasitas pengawasan tidak bergantung pada relasi kekaryawanan dengan yayasan.

Berdasarkan 18 kutipan yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa Yayasan An-Nashr memitigasi asimetri informasi melalui tiga mekanisme yang saling mengunci yaitu, digitalisasi pencatatan dengan pemisahan tugas yang dikonfirmasi silang oleh dua informan internal, kebijakan akuntansi tertulis yang terdokumentasi resmi, serta struktur tata kelola berjenjang berbasis RKA-eksekusi-pengawasan dengan independensi pengawas lintas profesi. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, rekapitulasi kutipan dengan kode tag RM1.1 (digitalisasi pencatatan) baris 1 sampai dengan 6 seluruhnya bersumber dari transkrip wawancara pengurus, dengan dua narasumber berbeda yaitu ketua pengurus dan staf bagian akuntansi, yang secara konsisten menjelaskan alur pencatatan dana tunai hingga penginputan ke sistem zahir. Kode tag RM1.2 (Kebijakan Akuntansi Tertulis) pada baris 7 sampai dengan 11 memperlihatkan pergeseran sumber dokumen dari transkrip wawancara menjadi dokumen resmi, yaitu Laporan Keuangan Yayasan An-Nashr 2025 serta Surat Keputusan Nomor 003/YAN-SEKRE/SK/VIII/2025 dan Kebijakan Ketua Nomor

001/YAN/KETUA/VIII/2025, yang memperkuat validitas temuan karena tidak hanya bertumpu pada pernyataan lisan informan. Adapun kode tag RM1.3 (Struktur Pengawasan dan RKA) pada baris 12 sampai dengan 18 menunjukkan delapan kutipan berurutan dari Ketua Pengurus yang menjelaskan mekanisme perencanaan anggaran, fungsi kontrol Dewan Pengawas, hingga independensi komposisi pengawas, sehingga secara kolektif ketiga kode tag pada Tabel 1 ini memvisualisasikan bagaimana triangulasi sumber (wawancara dua informan internal dan dokumen resmi) mendasari kesimpulan mitigasi asimetri informasi pada temuan ini.

Strategi Keterbukaan Informasi dan Kesenjangan Akses Jamaah

Hasil wawancara dari sisi pengurus menunjukkan tersedianya beberapa saluran keterbukaan informasi. Saluran tersebut meliputi TV monitor di area masjid serta laporan tahunan formal yang dipresentasikan pada rapat gabungan (disebut RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, istilah yang dipinjam informan dari konteks korporasi). Program tertentu juga dipublikasikan melalui platform crowdfunding Kitabisa yang dilengkapi foto realisasi. Pengurus juga tengah menguji coba aplikasi *super app* "Ukhuwah" yang direncanakan memuat modul laporan keuangan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan masjid dalam rangka mendukung transparansi.

Namun, hasil pengodean pada rumusan masalah kedua menghasilkan temuan paling konsisten bahwa ketiga informan jamaah, secara terpisah, menyatakan belum pernah melihat laporan keuangan masjid secara lengkap atau detail, dan masing-masing mengandalkan kanal informal yang berbeda-beda, mulai dari grup WhatsApp antarteman, pengumuman verbal sebelum salat jumat, hingga grup WhatsApp pengurus bagi donatur rutin sekalipun. Konsistensi temuan pada tiga sumber independen ini mengindikasikan bahwa kanal formal yang dirancang pengurus, seperti TV monitor dan rapat gabungan, belum menjangkau jamaah reguler harian secara efektif. Pada Tabel 1, kode tag RM2.1 (Saluran Publikasi Pengurus) mulai muncul pada baris 19, dengan kutipan Ketua Pengurus yang menegaskan bahwa "setiap tahun laporan keuangan itu kita harus sampaikan ke semua sebenarnya, lewat rapat gabungan", yang menjadi titik masuk kode tag ini pada matriks rekapitulasi hasil koding. Baris-baris lanjutan dengan kode tag RM2.1 dan subtema terkait lainnya pada dokumen kerja Taguette, di luar cuplikan yang ditampilkan pada Tabel 1, secara total menyumbang 21 kutipan pada kategori keterbukaan informasi dan audit sosial, menjadikannya kategori dengan jumlah kutipan terbanyak di antara ketiga rumusan masalah

penelitian ini. Pola pergeseran kode tag dari RM1 ke RM2 yang terlihat pada Tabel 1 turut menggambarkan alur berpikir peneliti dalam proses reduksi data, yaitu bergerak dari perspektif agen (pengurus sebagai pengelola informasi) menuju perspektif prinsipal (jamaah sebagai penerima informasi), sejalan dengan kerangka teori keagenan yang mendasari penelitian ini.

Audit Sosial Berbasis Observasi Fisik

Ketiga informan jamaah menyatakan tidak pernah membandingkan laporan keuangan dengan kondisi fisik masjid secara langsung. Meski begitu, ketiganya tetap menyatakan puas dan percaya terhadap fasilitas yang ada. Masing-masing menyebutnya "cukup bagus", "memuaskan", bahkan menilai Masjid An-Nashr sebagai masjid "yang paling *proper* di Bintaro" dibanding masjid-masjid lain di sekitarnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi audit sosial pada level jamaah berjalan bukan melalui verifikasi dokumen tertulis, melainkan melalui verifikasi inderawi dan pengalaman langsung terhadap kualitas layanan.

Dokumentasi fotografis kondisi fisik masjid yang diperoleh peneliti memungkinkan dilakukannya triangulasi visual-dokumen secara independen. Ruang utama salat menunjukkan *finishing* marmer, mimbar, dan dua unit TV monitor yang terpasang di area imam, yang secara visual mengonfirmasi pernyataan Ketua Pengurus mengenai fungsi TV monitor sebagai kanal informasi jamaah. Dokumentasi ruang salat wanita menunjukkan karpet yang tampak baru, yang dapat ditelusuri langsung ke pos "Karpet Ruang Sholat Wanita" senilai Rp68.148.000 dengan tanggal perolehan 28 Desember 2025 pada lampiran daftar harta tetap laporan keuangan. Ditemukan pula plakat "Infaq Digital" berisi kode QR pembayaran (LinkAja, OVO, dan kanal lain) yang terpasang permanen di area masjid, mengonfirmasi pernyataan pengurus mengenai QRIS sebagai salah satu sumber penerimaan digital. Terakhir, papan jadwal pemakaian ruangan serbaguna mencatat penyewaan aktif untuk kegiatan pernikahan, yang berkorelasi dengan pos penerimaan "Penyewaan Lahan Parkir, Gedung, DLL" (Rp12.150.000) dan "Bagi Hasil Sewa Kios dan Kedai Jajan oleh PT Syiara" (Rp92.065.000) pada laporan aktivitas rincian.

Triangulasi ini memperlihatkan bahwa jamaah individual tidak melakukan perbandingan formal antara laporan keuangan dan kondisi fisik. Meski demikian, peneliti dapat mengonfirmasi secara independen konsistensi antara klaim akuntansi dan realitas lapangan pada beberapa pos material. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang terverifikasi secara independen di sini adalah kesesuaian antara pos laporan keuangan dan kondisi fisik

masjid, bukan dasar kepercayaan jamaah itu sendiri. Ketiga informan jamaah menyatakan tidak pernah membandingkan keduanya secara langsung, sehingga kepercayaan mereka tetap berbasis kesan dan pengalaman inderawi, yang secara kebetulan sejalan dengan temuan verifikasi peneliti pada penelitian ini.

Dampak Akuntabilitas dan Realisasi Program terhadap Keberlanjutan Organisasi

Berdasarkan laporan keuangan, total aset yayasan mencapai Rp19.640.000.000 dengan kas dan setara kas sebesar Rp1.130.000.000. Meski laporan aktivitas mencatat defisit akuntansi sebesar Rp414.800.000, angka ini sepenuhnya dapat dijelaskan oleh beban penyusutan aset tetap sebesar Rp990.200.000 akibat ekspansi fisik masjid, bukan indikasi pengelolaan yang tidak sehat, mengingat secara operasional murni yayasan justru mencatatkan surplus bruto sebesar Rp568.100.000, dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 28.3% pada tahun 2025. Angka pertumbuhan ini belum dapat dibandingkan dengan tren penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya, karena data yang diberikan pihak yayasan kepada peneliti dibatasi hanya untuk periode tahun 2025 dengan pertimbangan kerahasiaan data keuangan internal. Hubungannya dengan keaktifan program pun masih bersandar pada pernyataan satu informan, sehingga temuan ini sebaiknya dibaca sebagai indikasi awal, bukan bukti hubungan sebab-akibat yang kuat.

Ketua pengurus menegaskan bahwa keberlanjutan pendanaan yayasan sangat bergantung pada keaktifan realisasi program yang menarik lebih banyak donatur, sementara masjid yang pasif cenderung tidak dikenal dan minim pemasukan. Hal ini diwujudkan antara lain melalui layanan pemandian dan penginapan jenazah 24 jam yang melayani warga lintas wilayah tanpa biaya bagi kaum dhuafa. Pada level persepsi jamaah, ditemukan variasi motivasi donasi yang menarik: satu informan menyatakan keterbukaan informasi “jelas berpengaruh” terhadap keputusan berdonasi, sementara dua informan lainnya menempatkan motivasi keagamaan (lillahi ta'ala) sebagai pendorong utama. Dari empat kutipan pada tema ini, tiga di antaranya mengarah pada motivasi berbasis keimanan, sementara hanya satu yang secara eksplisit mengaitkan keputusan donasi dengan transparansi laporan keuangan, menjadi indikasi awal bahwa transparansi formal belum tentu menjadi faktor dominan penggerak keputusan donasi pada level jamaah individual. Mengingat basis data yang tipis (empat kutipan dari tiga informan), simpulan ini perlu diuji lebih lanjut dengan jumlah dan variasi informan yang lebih besar sebelum digeneralisasi.

Ketiga informan jamaah dalam penelitian ini juga menunjukkan keseragaman jawaban

terkait kepuasan terhadap kondisi fisik masjid dan pola akses informasi yang serupa. Keseragaman ini perlu dibaca secara hati-hati. Selain interpretasi bahwa temuan ini kuat, ada kemungkinan lain, yaitu bahwa ketiga informan memiliki profil keterlibatan yang relatif mirip, sama-sama jamaah aktif dengan akses ke grup WhatsApp tertentu. Akibatnya, variasi pandangan dari jamaah dengan profil berbeda, misalnya jamaah pasif atau yang tidak tergabung dalam kanal informal apa pun, belum tertangkap dalam penelitian ini.

Posisi Temuan terhadap Literatur

Temuan mengenai tiga lapis mekanisme mitigasi asimetri informasi pada penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas temuan Widhawati *et al*. (2021) dan Yudhanti & Margarita (2024). Kedua studi tersebut menyoroti bahwa penerapan ISAK 35 pada masjid umumnya masih terkendala keterbatasan pemahaman regulasi. Berbeda dengan konteks tersebut, Masjid An-Nashr menunjukkan tingkat kematangan tata kelola yang lebih tinggi melalui kebijakan akuntansi tertulis dan struktur pengawasan berlapis dengan pengawas lintas profesi independen. Persoalan keterbatasan kapasitas pengurus sebagaimana ditemukan Melia (2022) karena itu relatif dapat diatasi pada kasus ini.

Sebaliknya, temuan mengenai kesenjangan antara saluran formal dan jangkauan jamaah harian sejalan dengan gagasan Dethier *et al*. (2024). Menurut gagasan tersebut, transparansi merupakan konstruk multidimensi yang tidak cukup dinilai dari ketersediaan informasi semata, melainkan juga dari aksesibilitasnya bagi pemangku kepentingan. Ketersediaan kanal seperti TV monitor dan rapat gabungan pada penelitian ini sejalan dengan konsep *web-based accountability* pada Chu & Luke (2023). Kanal tersebut ternyata tidak otomatis menjamin keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan prinsipal, khususnya jamaah reguler yang tidak menghadiri forum formal.

Temuan paling menarik dari penelitian ini adalah bahwa fungsi audit sosial pada level jamaah An-Nashr berjalan melalui observasi fisik dan pengalaman inderawi, bukan verifikasi dokumen formal sebagaimana diasumsikan pada kerangka *mandatory disclosure* (Barber *et al*., 2022). Pola ini justru selaras dengan temuan Hanida *et al*. (2024) bahwa publikasi kas informal tetap efektif menjaga motivasi donasi warga. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peran alat digital dalam mendorong transparansi *real-time* (Nurdiani *et al*., 2025) perlu diimbangi pada konteks organisasi keagamaan berbasis komunitas. Strategi komunikasi non-digital dibutuhkan untuk menjangkau jamaah harian secara langsung.

Temuan ini juga membuka pertanyaan teoretis yang lebih dalam bagi teori keagenan. Jika pengawasan prinsipal terhadap agen dapat berjalan efektif melalui pengalaman inderawi dan observasi fisik, bukan semata mekanisme dokumenter formal, maka ada kemungkinan biaya keagenan (*agency cost*) tertekan melalui jalur non-dokumenter. Jalur tersebut selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur teori keagenan pada organisasi nirlaba. Di sinilah kontribusi teoretis penelitian ini sebenarnya berada, yaitu memperluas pemahaman mekanisme pengawasan keagenan di luar kerangka verifikasi dokumen formal yang selama ini dominan.

Tabel 1. Hasil Olah Data

No	Rumusan Masalah	Kode Tag	Sumber Dokumen	Informan/ Narasumber	Kutipan/Highlight	Catatan Interpretasi
1	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.1 - Digitalisasi Pencatatan	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Jadi infak itu, itu ada di, ada yang di kotak. Di kotak Amal. Ada yang orang ngasih cash. Ada yang transfer. Ada yang QRIS dan sebagainya Nah, itu di-cut-off.	
2	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.1 - Digitalisasi Pencatatan	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Ya, bisa mingguan. Saya minta waktu itu mingguan. Setiap minggu itu dilihat. Kenapa saya buat mingguan dan bulanan? Karena apa? Untuk menganalisis.	
3	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.1 - Digitalisasi Pencatatan	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Nah, karena ini masjid. Maka sangat berhubungan, Pendapatan itu sangat berhubungan dengan penanggalan hijriah.	
4	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.1 - Digitalisasi Pencatatan	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Makanya nggak bisa kalau kita nganalisis per Januari, Februari, Maret.	

No	Rumusan Masalah	Kode Tag	Sumber Dokumen	Informan/ Narasumber	Kutipan/Highlight	Catatan Interpretasi
5	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.1 - Digitalisasi Pencatatan	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Jadi dokumentasinya didokumentasikan secara kertas. Tapi langsung di input ke Zahir. Sehingga kita bisa melihat secara real time itu seperti apa.	
6	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.1 - Digitalisasi Pencatatan	Transkrip Wawancara Pengurus	P2 (Staf Akuntansi)	Di sini kan kita ada finance juga yang memegang uang fisik. Nah di situ dari uang fisik itu dibikinlah buku kas sama finance kita. Jadi dari buku kas itu direkap sesuai tadi yang Pak Umam bilang per minggu.	
7	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.2 - Kebijakan Akuntansi Tertulis	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Kalau itu karena sudah by aplikasi saya rasa gak jadi masalah. Gampang kok. Yang penting kita punya aturan mainnya.	
8	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.2 - Kebijakan Akuntansi Tertulis	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Misalnya mengakuntansikan CIP (Construction in Progress).	Istilah yang dimaksud informan kemungkinan adalah CIP (Construction in Progress), bukan "CAP"; disesuaikan dengan istilah pada kebijakan

No	Rumusan Masalah	Kode Tag	Sumber Dokumen	Informan/ Narasumber	Kutipan/Highlight	Catatan Interpretasi
					resmi yayasan.	
9	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.2 - Kebijakan Akuntansi Tertulis	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Kalau itu gak ada maka akhirnya setiap orang mempunyai pemahaman masing-masing. Itu yang gak standar. Nah itu akhirnya sulit nanti. Pada saat audit, bahwa pada saat mengakuntansikan itu makin sulit. Makanya SOP, kebijakan-kebijakan itu harus dibuat dulu.	
10	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.2 - Kebijakan Akuntansi Tertulis	Laporan Keuangan Yayasan An-Nashr 2025	Dokumen - SK No.003/YAN-SEKRE/SK/VIII/2025	Surat keputusan pencatatan aset dalam laporan keuangan yayasan an	
11	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.2 - Kebijakan Akuntansi Tertulis	Laporan Keuangan Yayasan An-Nashr 2025	Dokumen - Kebijakan Ketua No.001/YAN/KETUA/VIII/2025	Surat kebijakan kapitalisasi pekerjaan dalam pelaksanaan	
12	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Karena setiap akhir tahun itu masjid membuat rencana kegiatan anggaran tahun berikutnya RKA namanya	
13	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Jadi sebelum awal tahun itu kita harus di approve oleh Dewan	

No	Rumusan Masalah	Kode Tag	Sumber Dokumen	Informan/ Narasumber	Kutipan/Highlight	Catatan Interpretasi
14	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Kalau gak sesuai tidak akan dilayani oleh teman-teman sekretariat.	
15	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Ya jadi harusnya seperti itu, fungsi pengawas adalah kontrol dalam eksekusi. jadi misalnya pengurus sudah membuat RKA 1 tahun, nah mereka mengawasi kontrol kegiatan apakah benar dilaksanakan sesuai dengan itu atau ada penyimpangan?	
16	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	kalo misal tidak direncanakan, berarti anda merencanakan suatu kegagalan.	
17	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Tapi kalo pengurus, pembina, pengawas, dan pengurus, itu adalah volunteer, tidak digaji.	
18	RM1 - Mitigasi Asimetri Informasi	RM1.3 - Struktur Pengawasan & RKA	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	misal pengawas itu ada orang dari kejaksaan agung, pas kan, terus ada dosen itb.	
19	RM2 - Keterbukaan Informasi & Audit Sosial	RM2.1 - Saluran Publikasi Pengurus	Transkrip Wawancara Pengurus	P1 (Ketua Pengurus)	Di setiap tahun laporan keuangan itu. Kita harus sampaikan ke semua sebenarnya. Lewat rapat gabungan.	

Sumber: Diolah peneliti (2026)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mitigasi asimetri informasi pada Yayasan An-Nashr telah dilakukan secara terstruktur melalui digitalisasi, kebijakan formal, dan tata kelola berjenjang, namun strategi keterbukaan informasi ke jamaah masih menyisakan kesenjangan implementasi. Audit sosial di tingkat jamaah individual ternyata tidak berjalan melalui mekanisme verifikasi dokumen sebagaimana diasumsikan pada kerangka teoretis awal, melainkan melalui observasi fisik dan pengalaman layanan langsung, sebuah bentuk kontrol informal berbasis kepercayaan dan kesan inderawi. Triangulasi visual-dokumen yang dilakukan peneliti mengonfirmasi kesesuaian antara sebagian pos laporan keuangan dan kondisi fisik di lapangan, namun triangulasi ini bersifat parsial dan belum sistematis, sehingga temuan mengenai dinamika audit sosial ini sebaiknya dibaca sebagai indikasi kuat, bukan validasi penuh. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris awal mengenai bentuk riil audit sosial pada organisasi nirlaba keagamaan, yang berbeda dari asumsi verifikasi dokumen formal dalam literatur transparansi nirlaba pada umumnya. Karena An-Nashr merupakan kasus dengan tata kelola yang relatif matang, aset besar (Rp19.64 miliar), sistem akuntansi digital, dan dewan pengawas lintas profesi, temuan bahwa audit sosial tetap berjalan secara inderawi, bukan dokumenter, pada kasus seperti ini justru menjadi lebih bermakna: ia menunjukkan bahwa kesenjangan verifikasi formal-informal dapat terjadi bahkan pada organisasi dengan kapasitas tata kelola yang baik. Temuan ini karenanya dibingkai sebagai kasus ekstrem yang informatif (*extreme/information-rich case*), bukan generalisasi untuk organisasi nirlaba keagamaan secara umum.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah dan variasi informan yang hanya melibatkan lima informan, yang terdiri dari dua pengurus dan tiga jamaah aktif. Sehingga terindikasi bahwa jumlah sampel saat ini masih terbatas dan mungkin belum merepresentasikan seluruh lapisan jamaah. Penelitian ini juga belum melakukan triangulasi fisik yang sistematis. Sehingga validitas temuan mengenai dinamika audit sosial belum kuat. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu objek, yaitu Masjid An-Nashr Bintaro Sektor 5. Hal ini memunculkan keterbatasan generalisasi temuan untuk organisasi nirlaba atau masjid lain dengan skala dan karakteristik yang berbeda. Sebagai catatan reflektif, peneliti

menyadari bahwa proses wawancara dan interpretasi data dalam penelitian interpretif seperti ini tidak lepas dari sudut pandang dan latar belakang peneliti sendiri; kedekatan peneliti dengan konteks lapangan berpotensi memengaruhi cara pertanyaan diajukan maupun cara kutipan dimaknai, sehingga pembaca perlu mempertimbangkan posisi ini ketika menilai temuan penelitian.

Bagi pengurus organisasi nirlaba serupa, temuan ini menyarankan perluasan kanal publikasi informasi yang lebih menjangkau jamaah reguler harian, tidak hanya donatur program khusus. Bagi penelitian selanjutnya, perluasan jumlah dan variasi informan jamaah serta observasi triangulasi fisik yang lebih sistematis dapat memperkuat validitas temuan mengenai dinamika audit sosial pada organisasi nirlaba keagamaan. Bagi regulator, khususnya kementerian agama dan pihak yang menyusun pedoman pelaporan entitas nirlaba keagamaan, temuan mengenai kesenjangan antara saluran publikasi formal dan jangkauan jamaah harian dapat menjadi masukan. Masukan tersebut mengarah pada standar publikasi laporan keuangan masjid yang lebih inklusif, misalnya melalui format ringkas yang mudah diakses jamaah non-formal, sejalan dengan semangat ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

DAFTAR RUJUKAN

Anggraini, D. A., Maula, A. I. A., & Fadilah, D. N. (2026). Analisis pertumbuhan dana zakat berdasarkan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) periode 2021–2023. *Journal of Management, Accounting, and Administration, 3*(1).

Barber, P., Farwell, M. M., & Galle, B. (2022). Does mandatory disclosure matter? The case of nonprofit fundraising. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 51*(1), 31–52. https://doi.org/10.1177/08997640211001458

Chu, V., & Luke, B. (2023). NPO web-based accountability: How can we know if NPOs are doing good things? *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 52*(1), 75–105. https://doi.org/10.1177/08997640211062856

Dethier, F., Delcourt, C., & Dessart, L. (2024). Donor perceptions of nonprofit organizations' transparency: Conceptualization and operationalization. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 53*(5), 1230–1260. https://doi.org/10.1177/08997640231211212

Dethier, F., Delcourt, C., & Willems, J. (2023). Transparency of nonprofit organizations: An integrative framework and research agenda. *Journal of Philanthropy and Marketing, 28*(4). https://doi.org/10.1002/nvsm.1725

Hanida, I., Hamzani, U., & Yunita, K. (2024). Analisis perspektif donatur dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan, 7*(2).

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Lating, A. I. S. (2023). Penyajian laporan keuangan masjid sesuai ISAK No. 35 untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Studi kasus pada Masjid At-Tadzkiroh, Sidoarjo). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7*(1). https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1222

Melia, Y. (2022). Penerapan standar akuntansi keuangan pada organisasi nirlaba: Literatur review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 5*(1), 103. https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.14500

Nurdiani, T., Rahmawati, D., Pogo, T., & Bakar, N. R. B. A. (2025). Financial transparency and accountability in nonprofit organizations: A systematic literature review. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance, 4*(2), 166–180. https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.102

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoretis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration, 1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi ke-2). Alfabeta.

Widhawati, E. O., Suhartini, D., & Widoretno, A. A. (2021). Akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 (Studi pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi, 8*(2).

Yudhanti, A. L., & Margarita, R. P. (2024). Penerapan ISAK 35 sebagai landasan akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid: Studi pada Masjid Darussalam Krian. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 12*(2), 322–333. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU